

BAB I

PENDAHULUAN

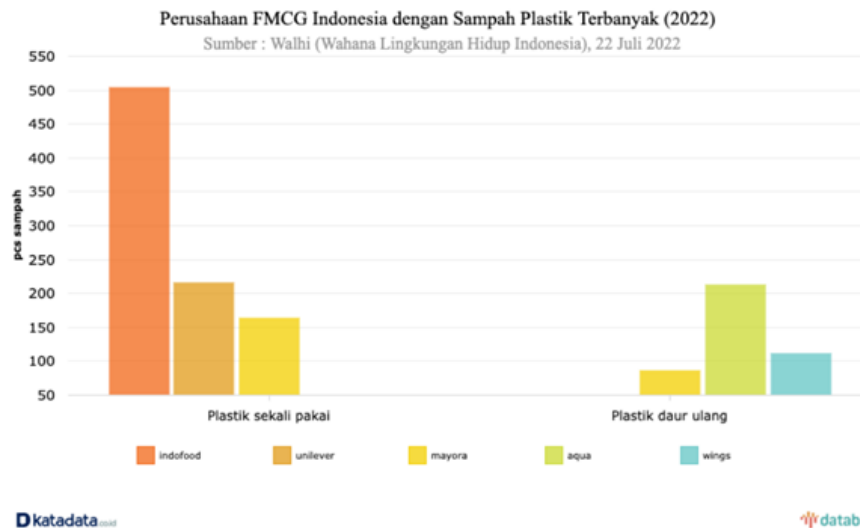
1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan sektor *Non-Cyclical Consumer* merupakan perusahaan yang memproduksi konsumsi barang primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2022. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kategori *consumer non-cyclicals* dianggap sebagai peluang investasi yang menguntungkan karena adanya kemungkinan pertumbuhan dan apresiasi yang berkelanjutan pada saham mereka. Barang-barang yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals* memiliki hubungan yang kuat dengan masyarakat umum, karena sebagian besar penawaran mereka digunakan oleh masyarakat umum.

Sektor *consumer non-cyclicals* (barang kebutuhan primer) merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat (Zanubah et al., 2023). Pertumbuhan ini didorong oleh perkembangan sektor tersebut yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat (Dewi, 2018). Seiring dengan peningkatan pendapatan, permintaan terhadap sektor *consumer non-cyclicals* diperkirakan akan terus bertambah. Sektor ini berfokus pada kegiatan bisnis yang mencakup produksi atau distribusi barang dan jasa esensial yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan konsentrasi pada penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari, sektor ini cenderung tetap stabil meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi, sehingga permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tidak terlalu terpengaruh (Zanubah et al., 2023).

Menurut (Amira dan Siswanto (2022), perusahaan yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals* dianggap tahan terhadap krisis global karena sektor ini diklasifikasikan sebagai industri yang stabil dan secara konsisten mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Produk dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* sangat erat dengan masyarakat karena sebagian besar produknya digunakan oleh masyarakat (Amira

& Siswanto, 2022). Disamping hal tersebut, kekurangan dari perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yaitu sangat erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan, mengingat limbah-limbah yang dihasilkan dari perusahaan tersebut.



Gambar 1. 1 Perusahaan FMCG Indonesia dengan Sampah Plastik

Sumber : Databoks.katadata.co.id, 2022

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama Aliansi Zero Waste Indonesia melakukan investigasi di 11 kawasan pesisir pantai di Indonesia pada tahun 2022. Investigasi tersebut mengungkapkan bahwa terdapat total 16.519 sampah dengan berat mencapai 201,3 kg. Dari jumlah tersebut, 79,7% merupakan sampah plastik sekali pakai, sementara 9,2% adalah sampah plastik daur ulang. Tim investigasi juga mencatat bahwa plastik sekali pakai yang paling banyak ditemukan meliputi 504 sampah produk Indofood, 216 sampah produk Unilever, dan 164 sampah produk Mayora. Di sisi lain, untuk sampah plastik daur ulang, ditemukan 213 sampah produk Aqua, 111 sampah produk Wings Food, dan 86 sampah produk Mayora.

Pada Januari 2021 Bursa Efek Indonesia mengumumkan *IDX Industrial Classification* (IDX-IC) yang memasukkan sektor *Consumer Non-Cyclical* sebagai salah satu sektor penyusunnya. *Consumer Non-Cyclical* mengacu pada perusahaan yang terlibat dalam pembuatan atau distribusi barang dan jasa yang sering ditawarkan kepada konsumen. Barang-barang ini dianggap bersifat dasar dan tidak dipengaruhi oleh perubahan ekonomi. Bursa Efek Indonesia pada tahun

2021 mengidentifikasi berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan ritel, distribusi farmasi, distribusi makanan, distribusi supermarket, minuman keras, minuman ringan, produk susu olahan, makanan olahan, ikan, daging, produk unggas, perkebunan dan hasil bumi, rokok, perlengkapan rumah tangga, dan produk perawatan tubuh.

Berikut rata-rata persentase pertumbuhan jumlah emiten pada perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022.

Tabel 1. 1 Total Jumlah Pertumbuhan Emiten Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022

No	Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sektor <i>Consumer Non-Cyclical</i>	65	70	78	87	98	113

Sumber: idx.co.id, data diolah oleh penulis (2023)

Data yang ditunjukkan pada Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan yang konsisten dan stabil dalam jumlah Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* dari tahun 2017-2022. Pertumbuhan perusahaan diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap reputasi perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang secara aktif terlibat dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering kali membangun reputasi positif di antara konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Mengukur manfaat jangka panjang langsung dari reputasi positif dan dukungan masyarakat dapat menjadi tantangan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendokumentasikan upaya *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sukses dan konsisten. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang kuat harus mewujudkan dedikasi tulus perusahaan untuk mengatasi masalah sosial dan lingkungan dan harus digabungkan ke dalam etos bisnis yang lebih luas. Oleh karena itu, pengukuran *Corporate Social Responsibility* dilakukan untuk menilai koherensi perusahaan dalam segi pengungkapan dan pelaporan *Corporate Social Responsibility* -nya.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan menjalankan aktivitas operasinya. Perusahaan harus memiliki nilai moral yang tinggi, artinya perusahaan perlu membangun hubungan baik dengan sesama manusia dalam segala hal termasuk lingkungan bisnis (Ningsih & Suzan, 2021). *Corporate social responsibility* yang sukses menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan prinsip moral dan etika yang memungkinkan perusahaan berhasil tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan demi kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Tanggung jawab sosial dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Tujuan utama korporasi sebagai entitas korporat adalah untuk mencapai profitabilitas maksimum. Oleh karena itu, organisasi terlibat dalam upaya dan inisiatif operasional yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Cerminan kinerja sebuah perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangannya. Para pemangku kepentingan akan menggunakan operasi operasional dan laporan keuangan sebagai sarana untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan mereka. Menurut Yusuf (2017), pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan perusahaan dan memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan perusahaan. Namun, keberlangsungan sebuah perusahaan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan finansialnya tetapi juga oleh kapasitasnya untuk menghasilkan dampak yang menguntungkan bagi lingkungan dan masyarakat melalui praktik transparansi *Corporate Social Responsibility* (Irmayanti & Mimba, 2018).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada integrasi data lingkungan dan sosial ke dalam laporan tahunan perusahaan atau pernyataan tertulis lainnya dengan tujuan untuk memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan (Sen et al., 2011). Tujuan utama dari proses *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah untuk membangun sistem

pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan. Dengan memastikan akuntabilitas, keberlanjutan jangka panjang dari sumber daya ini dapat ditegakkan, sehingga mencegah gangguan terhadap keseimbangan alam dan habitat yang mereka dukung (Hadya & Susanto, 2018). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan sangat diperlukan. Pada awalnya, pelaporan CSR di Indonesia bersifat opsional, namun sejak diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mendokumentasikan inisiatif CSR yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan terpisah.

Pemangku kepentingan berperan sebagai aktor kunci yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan dan peraturan yang selaras dengan pertumbuhan dan kemajuan perusahaan. Teori pemangku kepentingan menjelaskan pentingnya orang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap atau terkena dampak dari operasi sebuah perusahaan, serta turut memikul tanggung jawab organisasi. Dalam rangka membina hubungan yang positif dengan para pemangku kepentingan perusahaan akan melakukan upaya bersama untuk mengkomunikasikan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara efektif. Hal ini merupakan tujuan penting bagi para pemangku kepentingan karena memungkinkan organisasi untuk membangun kredibilitas dan mendapatkan penerimaan dari masyarakat luas (Fairry & Suzan, 2023). Teori pemangku kepentingan, seperti yang diusulkan oleh Ningsih dan Suzan (2021), dapat digunakan untuk mengembangkan rencana kerja untuk tantangan yang dihadapi oleh manajemen perusahaan, seperti perubahan lingkungan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu metode komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan (Rizkyka & Suryani, 2021). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan para pemangku kepentingan dengan menyediakan informasi non-keuangan yang berkaitan dengan konsekuensi sosial dan lingkungan.

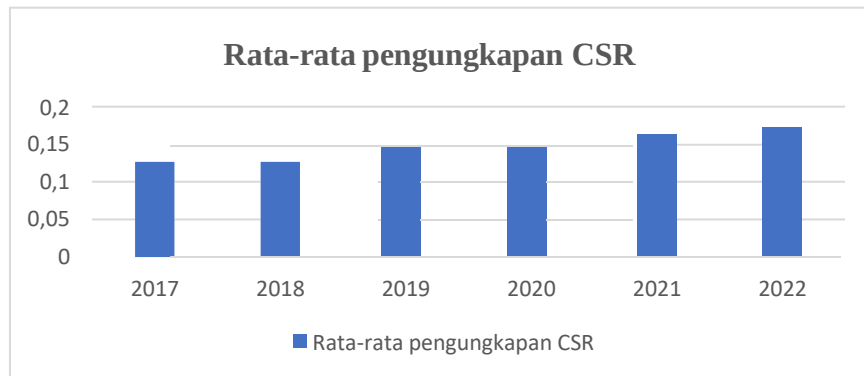
Penelitian ini berfokus pada pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagaimana pada fenomena yang telah dipublikasikan

pada situs daring antaranews.com yang secara khusus meneliti penyelewengan dana CSR. Penelitian ini dirilis pada tahun 2023. Setiap tahun, diperkirakan sekitar Rp10 triliun hingga Rp15 triliun dana CSR tidak dikelola secara efektif. Oleh karena itu, Bambang Soesatyo menegaskan perlunya adanya peraturan perundang-undangan, seperti yang disampaikan dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bamsoet, dosen tetap Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur. Bamsoet melaksanakan ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, dengan disertasi yang mengkaji tindakan hukum pemerintah daerah terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Menurutnya, peraturan mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini dituangkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap perusahaan harus melakukan kegiatan CSR. Namun demikian, implementasi pendekatan ini dalam industri masih terbatas karena tidak adanya sanksi yang kuat atau insentif lain yang dapat mendorong perusahaan untuk terlibat dalam operasi bisnis yang berhubungan dengan sumber daya alam. Undang-undang ini menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk menyalurkan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, penelitian ini memberikan hasil tentang pentingnya memperluas penyebaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) di antara berbagai perusahaan. Oleh karena itu, ia menilai bahwa kehadiran aturan hukum diharapkan dapat mengubah cara pandang perusahaan dari yang sebelumnya menganggap CSR sebagai beban menjadi mengakui CSR sebagai sarana untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengurangi beban pembangunan pemerintah, meningkatkan investasi sosial, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masing-masing organisasi (Khalida,2023).

Peningkatan tahunan dalam jumlah perusahaan Non-Siklus Konsumen yang melaporkan keberlanjutan di BEI terbukti. Terdapat korelasi positif antara

peningkatan pelaporan dan pertumbuhan transparansi pelaporan selanjutnya, sebagaimana dibuktikan oleh transparansi perusahaan sektor Konsumsi Non-Siklikal periode 2017-2022. Grafik di bawah ini menampilkan rata-rata skor pengungkapan CSR perusahaan-perusahaan Non-Siklikal Konsumsi dari tahun 2017 - 2022.



Gambar 1. 2 Rata-rata Pengungkapan CSR

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan Gambar 1.1, terdapat tren kenaikan yang nyata dalam skor rata-rata pengungkapan CSR perusahaan sektor konsumen non-siklus dari tahun 2017 hingga 2022. Namun demikian, tingkat transparansi masih cukup terbatas. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan adanya sejumlah indikator pengungkapan yang tidak patuh atau tidak dilaporkan yang tidak sesuai dengan Standar Global Reporting Initiative (GRI). Pada umumnya, perusahaan tidak mengungkapkan beberapa indikator seperti tata kelola, penilaian hak asasi manusia, dan privasi pelanggan. Kegagalan untuk mengungkapkan informasi ini dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan calon investor yang berujung pada penurunan citra perusahaan.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Majidah dan Galih Pangestu (2022) serta Rizki *et al.*, (2023), beberapa aspek telah diidentifikasi sebagai hal yang berpengaruh dalam konteks pengungkapan CSR. Elemen-elemen tersebut antara lain *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources*. Variabel awal yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan keragaman *gender* dewan. Keragaman *gender* dalam dewan mengacu pada variasi

perspektif antara laki-laki dan perempuan dalam dimensi budaya, sosial, dan perilaku. *Board diversity* mengacu pada variasi individu dalam dewan perusahaan. Keragaman terwujud melalui berbagai dimensi, termasuk *gender*, usia, ras, tingkat pendidikan, dan kebangsaan. Keberagaman dewan dianggap sebagai indikator otonomi dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Menurut Suzan dan Septia (2023), peningkatan penyebaran anggota dewan dapat menyebabkan munculnya konflik yang beragam, sekaligus menawarkan berbagai pilihan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Keragaman *gender*, sebagaimana didefinisikan oleh Yuliandhari *et al.*, (2022), mencakup karakteristik dan atribut unik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya. *Gender* dalam konteks keragaman *gender* mencakup beberapa aspek seperti karakteristik, peran, sikap, dan perilaku yang dipengaruhi oleh jenis kelamin perempuan atau laki-laki seseorang. Keberagaman *gender* mengacu pada adanya berbagai macam identitas *gender*, yang secara khusus mencakup laki-laki dan perempuan. Entitas organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dewan komisaris dan dewan direksi. Menurut Rizki *et al.*, (2023), keragaman *gender* dewan mengacu pada representasi perempuan di dewan direksi dan komisaris perusahaan.

Dewan direksi adalah aset berharga bagi perusahaan, dan komposisinya memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan perusahaan. Sebagai badan perwakilan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, *board diversity* direksi dianggap sebagai aspek integral dari tata kelola dan manajemen perusahaan yang efektif. Inklusi perempuan dalam tata kelola perusahaan diyakini dapat memberikan pengaruh karena perspektif mereka yang beragam dan kemampuan mereka untuk mengekspresikan pendapat tentang kebijakan tata kelola perusahaan. Pendapat yang disampaikan oleh perempuan memiliki dampak yang berbeda dalam perumusan kebijakan (Putri *et al.*, 2023).

Keragaman *gender* menawarkan beberapa manfaat, termasuk peningkatan penetrasi pasar, peningkatan kreativitas dan inovasi, peningkatan kemampuan pemecahan masalah, dan reputasi yang lebih kuat yang mengirimkan sinyal positif ke pasar. Kekurangannya mencakup komunikasi yang jarang, kolaborasi yang terbatas, dan konflik yang meningkat, yang mengakibatkan kesenjangan dan

penundaan dalam proses pengambilan keputusan karena gaya kepemimpinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Fenomena *glass ceiling* yang ditandai dengan terbatasnya promosi bagi perempuan telah berkontribusi pada munculnya isu keberagaman *gender*. Fenomena ini menghambat kemajuan kaum minoritas dan perempuan ke posisi hirarki yang lebih tinggi, sehingga mengakibatkan kelangkaan perempuan dalam struktur dewan (Putri et al., 2023). Keberadaan *board diversity* merupakan indikasi tata kelola perusahaan yang efektif dalam sebuah perusahaan terutama dalam kaitannya dengan keragaman *gender*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2023), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR), jika dikelola oleh perempuan, cenderung memberikan hasil yang lebih unggul. Pernyataan ini didasarkan pada premis bahwa perempuan cenderung menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Namun demikian, penelitian mengenai dampak keragaman *gender* terhadap pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menunjukkan temuan yang beragam. Inklusi perempuan dalam dewan perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pengaruh ini disebabkan oleh perbedaan perspektif yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki tentang nilai-nilai yang terkait dengan tanggung jawab sosial. Telah diamati bahwa perempuan cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial.

Selain itu, masuknya perempuan ke dalam dewan direksi perusahaan meningkatkan kemungkinan untuk mendukung atau membentuk kelompok-kelompok yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadh et al., (2019), yang menunjukkan bahwa inklusi perempuan dalam dewan direksi perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Namun, terdapat hubungan yang kurang baik antara keragaman *gender* dan pengungkapan CSR, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan Rismayani (2019). Laporan tahunan mencantumkan informasi mengenai *board gender diversity* yaitu pada bagian

laporan manajemen dan profil perusahaan. Bagian ini memberikan data mengenai representasi perempuan di dewan komisaris dan direksi.

Minimisasi risiko menjadi variabel kedua yang diteliti dalam penelitian ini. Komite manajemen risiko perusahaan bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian atau kerugian yang mungkin timbul selama kegiatan operasional perusahaan. Kehadiran komite manajemen risiko dalam operasional operasional berfungsi untuk memitigasi risiko yang berasal dari dalam perusahaan, sedangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan untuk mengatur lingkungan eksternal dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk masyarakat. Pengukuran *risk minimization* dalam suatu perusahaan ditentukan oleh ada tidaknya komite manajemen risiko. Komite ini bertanggung jawab untuk secara sistematis mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin timbul dan merancang strategi untuk memitigasinya. *Risk minimization* mengacu pada tindakan proaktif yang dilakukan suatu perusahaan untuk memitigasi potensi kerusakan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Selain sekedar kepatuhan, perusahaan juga harus memiliki pemahaman tentang konsekuensi sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan yang aktual dan potensial (Ruroh & Latifah, 2018).

Rendering dapat memfasilitasi pelaksanaan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara efisien dan selanjutnya selaras dengan harapan masyarakat. Salah satu motivasi di balik perusahaan yang terlibat dalam kegiatan CSR adalah untuk memitigasi risiko. Perbuatan korporasi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah yang bertujuan mengurangi risiko kerusakan tersebut (Silaban *et al.*, 2022a). Hal ini sejalan dengan temuan Ruroh & Latifah (2018) yang menjelaskan bahwa tindakan *risk minimization* berdampak pada transparansi *Corporate Social Responsibility*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lebih banyak perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki komite manajemen risiko. Majidah & Pangestu (2022) melakukan penelitian yang menyimpulkan bahwa *risk minimization* tidak berdampak terhadap

pengungkapan CSR. Komponen tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan mencakup komite manajemen risiko, yang bertanggung jawab untuk *risk minimization*.

Penelitian ini memasukkan variabel ketiga yaitu *Slack Resources*, yang mengacu pada sumber daya yang tersedia di dalam organisasi yang dapat digunakan secara efektif untuk mengatasi fluktuasi situasi tekanan internal dan eksternal (Bourgeois, 1981b). Perusahaan memiliki kesempatan untuk mengalokasikan sebagian sumber daya-nya untuk alasan sosial dan lingkungan karena ketersediaan sumber daya (Madyakusumawati, 2020). Selain itu, *Slack Resources* dapat dicirikan sebagai sumber daya berlebih yang dimiliki oleh perusahaan untuk secara efektif memenuhi persyaratan *output* dan beradaptasi dengan tekanan internal dan eksternal. Sumber daya ini mencakup berbagai aset organisasi yang melampaui ambang batas minimum yang diperlukan untuk menghasilkan output yang diinginkan pada tingkat yang telah ditentukan (Putri et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *Slack Resources* yang besar diantisipasi memiliki kapasitas untuk mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara lebih ekstensif.

Studi yang dilakukan oleh Melvin dan Rachmawati (2021) mengukur *Slack Resources* melalui pemanfaatan kas dan setara kas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tasya & Cheisviyanny (2019), keberadaan *Slack Resources* berdampak pada kualitas pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Secara spesifik, ketika perusahaan memiliki jumlah kas dan setara kas yang lebih besar, maka kualitas pelaporan CSR cenderung menurun. Menurut Rahmawati (2018), menyatakan bahwa keberadaan *Slack Resources* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan *Corporate Social Responsibility*. *Slack resources* dapat diamati atau dihitung dalam laporan tahunan atau laporan keuangan dengan mengacu pada laporan posisi keuangan, khususnya setara kas yang disajikan dalam akun-akun keuangan.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Board Gender Diversity, Risk Minimization, dan Slack resources Terhadap**

pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi Kasus Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022)”.

1.3 Rumusan Masalah

Menurut UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mendokumentasikan inisiatif CSR yang dilakukan oleh perusahaan baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan terpisah. Penggabungan inisiatif *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, memiliki potensi untuk meningkatkan tujuan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara luasnya pelaporan dan kualitas transparansi yang masih belum memadai. Skor rata-rata kualitas pengungkapan CSR yang relatif rendah pada perusahaan sektor barang mentah untuk periode 2019-2021 menjadi indikasi fenomena ini. Akibatnya, hal ini dapat berdampak pada proses pengambilan keputusan investor yang sedang mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana mereka.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian lain yang telah meneliti pengungkapan CSR dan berbagai elemen yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait pengaruh *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan dalam latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?
2. Apakah *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang

terdaftar di BEI tahun 2017-2022?

3. Apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?
4. Apakah *Risk Minimization* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?
5. Apakah *Slack resources* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, peneliti menguraikan tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022
2. Untuk mengetahui apakah *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022
3. Untuk mengetahui apakah *Board Gender Diversity* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022
4. Untuk mengetahui apakah *Risk Minimization* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022
5. Untuk mengetahui apakah *Slack resources* berpengaruh secara

parsial terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2017-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas memiliki manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Dalam penelitian ini, kegunaan akademis yang ingin dicapai dan diharapkandari penerapan pengetahuan dalam penelitian antara lain:

- 1) Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi khususnya pada pemahaman yang berkaitan dengan tujuan meningkatkan pengungkapan *corporate social respomsibility*.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bukti empiris dalam pengungkapan *corporate social respomsibility* yang dapat dijadikan tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social respomsibility* pada penelitian di masa mendatang.

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi Investor, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh Investor sebagai tambahan informasi yang dijadikan pertimbangan sebelum melakukan investasi pada perusahaan
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk, mengambil keputusan dalam meningkatkan pengungkapan *corporate social respomsibility*, serta dapat memberi masukan untuk perusahaan kedepannya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penyusunan sistematika penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi pembahasan dalam penelitian yaitu terkait pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Peneliti akan menjelaskan dengan

singkat untuk mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran peneliti pada kerangka yang telah ditetapkan secara sistematis. Sistematika penulisan bab yang akan dipresentasikan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena, rumusan masalah berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan perihal landasan teori yang berkenaan dengan *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian, kerangka berfikir teoritis serta hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, Teknik pengumpulan data, jenis data, serta teknis menganalisis data dan pengujian hipotesis yang berkenaan dengan *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian secara deskriptif dari data yang telah diolah, analisis hipotesis. Bab ini juga mengungkapkan pengaruh *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan terkait pengaruh *Board Gender Diversity*, *Risk Minimization*, dan *Slack resources* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Adapula

saran yang disampaikan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya.